



LAKIP

TAHUN 2022

DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kota Bandung ini menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan pada sumber daya keuangan, manusia dan sarana prasarana yang dimiliki secara transparan dengan harapan semoga laporan ini dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak yang berkepentingan

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung, hal tersebut didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung selama satu tahun sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

LKIP ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada pada Sekretariat dan Bidang-bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Materi LKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung. LKIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Selanjutnya diharapkan LKIP 2022 Dinas Pendidikan Kota Bandung ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Dinas Pendidikan Kota Bandung selanjutnya.



Disadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Bandung, Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung



Drs. HIKMAT GINANJAR, M.Si.
NIP. 19640629 198503 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan	2
C, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
D. Isu Strategis	7
E, Landasan Hukum	7
F, Sistematika Penulisan	8
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	10
A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu.....	10
B. Indikator Kinerja Utama.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	15
D. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	17
E. Rencana Strategis Hasil Reviu.....	17
F. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu.....	17
G. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	19
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	21
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	24
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	25
D. Realisasi Anggaran	50
BAB IV – PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
C. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	58
LAMPIRAN	60



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik. Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian, tujuan, dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari



korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Bandung termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar sampai dengan bulan Desember 2022 sebanyak 8.710 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada: Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Asset, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program Data dan Informasi, Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP dan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tabel 1.1
Jumlah PNS Dinas Pendidikan

NO	Jenis Jabatan	Kantor Dinas Pendidikan	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta	Total
		1	2	3	
1	Pejabat Struktural	20			20
2	Kepala Sekolah		305		305
3	Pejabat Pelaksana	82	-	-	82
	- Pengelola Keuangan	-	62	-	62
	- Analis TU	-	38	-	38
	- Pengadministrasi Umum	-	166	-	166
	- Pramukelompok	-	101	-	101
4	Jabatan Fungsional Guru		7.295	487	7782
5	Jabatan Fungsional Selain Guru	-	-	-	0
	- Analis Kepegawaian Muda	1	-	-	1
	- Analis Kepegawaian Pertama	5	-	-	5
	- Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	-	-	1
6	Pengawas Sekolah	86	-	-	86
7	Penilik	39	-	-	39
8	Pamong Belajar	22	-	-	22
	Total	256	7.967	487	8.710

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Tahun 2022

Sedangkan jumlah tenaga pendidik ASN maupun non ASN yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung sebanyak 17.775 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang	<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah
SD	334	15	102	55	8510	258	4	9278
SMP	83	19	15	63	4287	498	4	4969
TK	174	54	27	29	1312	22	1	1619
PAUD NON FORMAL	1250	80	32	89	455	3	0	1909
Total	1841	168	176	236	14564	781	9	17775

Sumber : Sub Bagian Program (DAPODIK) Dinas Pendidikan Tahun 2022

b. Anggaran

Dari sisi anggaran, Dinas Pendidikan Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2016-2021 beserta serapannya sebagai berikut:

Tabel 1.3

Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2016	Rp. 290.643.775.619,00	Rp. 263.256.480.390,00	90,58
2	2017	Rp. 1.331.926.412.870,00	Rp. 1.193.461.836.024,00	89,60
3	2018	Rp. 411.904.967.463,00	Rp. 344.363.771.799,00	83,60
4	2019	Rp. 1.060.239.234.094,91	Rp. 558.145.131.897,00	52,64
5	2020	Rp. 521.869.537.061,85	Rp. 467,552,770,738.00	89,59
6	2021	Rp. 1.731.995.934.274,00	Rp. 1.578.704.999.659,00	91,15

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan

c. Sarana Prasana Instansi

Dinas Pendidikan Kota Bandung menempati kantor yang bertempat di Jalan Ahmad Yani No 239, Bandung, Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4

Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
PAUD NON FORMAL	653	1.899	385	38	1
SD	473	5.837	605	225	25
SMP	260	3.663	1.298	860	193
TK	467	1.660	275	30	1
Total	1.853	9.140	2.563	1153	220

Sumber : Sub Bagian Program Dinas Pendidikan Tahun 2022

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung, sebagai berikut:

a. Tugas Pokok.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan.

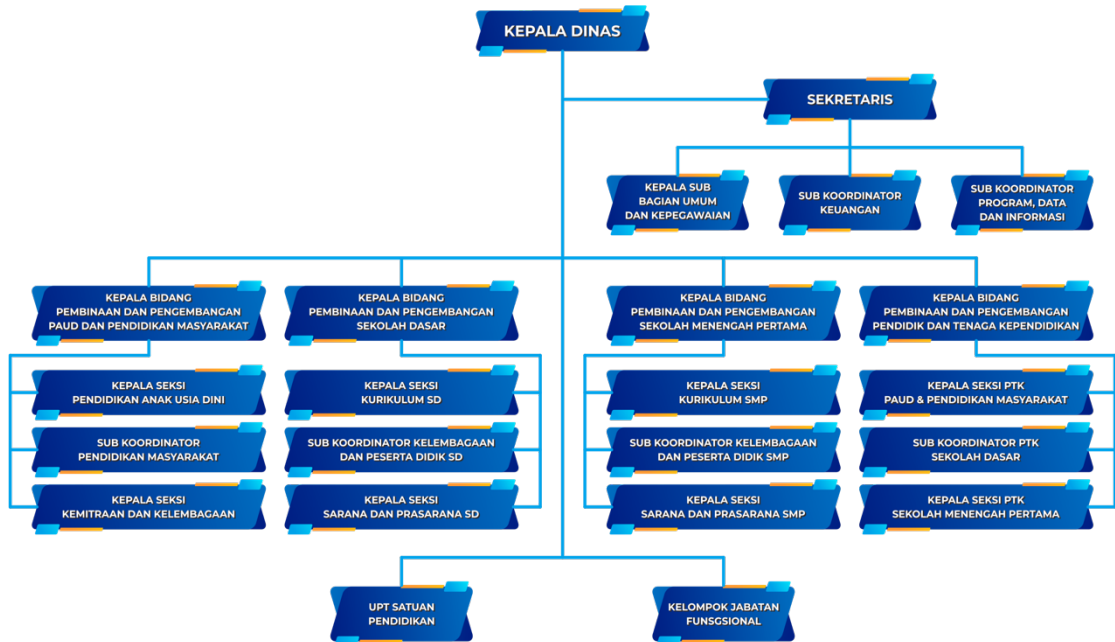
b. Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas. maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan lingkup pendidikan;
2. pelaksanaan kebijakan lingkup pendidikan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pendidikan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup pendidikan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut:



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator Keuangan;
 3. Sub Koordinator Program, Data dan Informasi,
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat, yang membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Sub Koordinator Pendidikan Masyarakat
 3. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan
- d. Bidang Pembinaan & Pengembangan Sekolah Dasar, yang membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum
 2. Sub Koordinator Kelembagaan dan Peserta Didik
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama, yang membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum
 2. Sub Koordinator Kelembagaan dan Peserta Didik

3. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pendidik & Tenaga Kependidikan, yang membawahkan:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
 2. Sub Koordinator Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - (2) Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

D. Isu Strategis

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan mandat yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota, yang meliputi pendidikan anak usia dini hingga setingkat pendidikan menengah pertama. Sampai dengan saat ini layanan Pendidikan Dasar (SD dan SMP/Sederajat) belum optimal karena rasio rombongan belajar (rombel) belum memenuhi standar nasional. Selain itu kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar pada sekolah negeri belum merata. Serta terminologi sekolah favorit menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih sekolah tersebut.

E. Landasan Hukum

LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3).
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1380 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kota Bandung.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022 adalah:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini berisi ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2020-2023.

Selaras dengan tuntutan perkembangan di masa mendatang, Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Perda No. 08 Tahun 2008) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023). Akan

tetapi Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 30 November Tahun 2021, telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Adapun yang melatar belakangi perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMD Tahun 2020-2024
 - Penyelarasan sasaran, Prioritas Pembangunan Daerah dengan sasaran, Prioritas Pembangunan Nasional;
 - Penyelarasan Program dan Kegiatan strategis Daerah dengan Program dan Kegiatan strategis Prioritas Nasional
2. PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Penyesuaian struktur Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur PPKD
 - Penyesuaian Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah (dan pemutakhirannya berdasarkan Kepmendagri 050-3708)
4. Hasil Evaluasi RPJMD Dampak Pandemi COVID-19
 - Penyesuaian Prioritas Pembangunan
 - Penyesuaian Tema Pembangunan
 - Reformulasi target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
5. Permendagri No. 18 Tahun 2020
 - Penyesuaian Indikator Makro, Indikator Kinerja Kunci Outcome dan Output dengan Permendagri 18/2020
6. Perubahan KLHS
 - Penyesuaian Gambaran Umum terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Kota Bandung
 - Penyesuaian Permasalahan dan Isu Strategis
 - Penyesuaian Program terhadap Rekomendasi KLHS
7. Rekomendasi Kemenpan RB (Evaluasi AKIP)

- Penyesuaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, dan Program serta indikatornya
8. Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2020
- Melakukan monitoring dan evaluasi yang tepat dan terukur terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, khususnya di kaitkan dengan pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

Hasil monev ini diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan dalam perencanaan selanjutnya

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti perubahan perda RPJMD tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 serta Renja Dinas Pendidikan untuk mengimplementasikan program dan kebijakan tersebut. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2020-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi,



harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020-2023 adalah:

TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS

3. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2020-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
- c. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
- d. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
- e. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pendidikan Tahun 2020-2023 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut



indikator dan target Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Pendidikan Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Per Tahun			Target Akhir Renstra	Satuan
			2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	98,55	92,70	92,77	92,86	92,86	Persen
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	90,04	90,10	90,17	90,23	90,23	Persen
	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	100	100	100	100	100	Persen
	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,88	85,00	85,05	85,10	85,10	Poin

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas



Pendidikan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Satuan
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	92,77	Persen
	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	90,17	Persen
Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	100	Persen
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,05	Poin

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Pendidikan Kota



Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2022	Satuan
Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	$APK\ PAUD = (Siswa\ PAUD / Penduduk\ usia\ PAUD) \times 100\%$ $APK\ SD = (Siswa\ SD / Penduduk\ usia\ SD) \times 100\%$ $APK\ SMP = (Siswa\ SMP / Penduduk\ usia\ SMP) \times 100\%$	92,77	Persen
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	$APM\ PAUD = (Siswa\ usia\ PAUD / Penduduk\ usia\ PAUD) \times 100\%$ $APM\ SD = (Siswa\ usia\ SD / Penduduk\ usia\ SD) \times 100\%$ $APM\ SMP = (Siswa\ usia\ SMP / Penduduk\ usia\ SMP) \times 100\%$	90,17	Persen
	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100 $Persentase\ AL = \frac{JL}{JL2} \times 100$ JL: Jumlah Siswa JL2: Jumlah Siswa tahun sebelumnya	100	Persen
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot/ Jumlah Unsur IKM: (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur	85,05	Poin



Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2022	Satuan
			yang terisi) x Nilai Penimbangan		

D. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2022

E. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pendidikan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2022. Hasil reviu menunjukkan tidak ada perubahan indikator maupun target kinerja pada tahun 2022

F. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Hasil reviu

menunjukkan tidak ada perubahan indikator maupun target kinerja pada tahun 2022

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bandung hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu
Dinas Pendidikan Kota Bandung

Sasaran	Alasan	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2022	Satuan
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Indikator ini dipilih untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	$APK\ PAUD = (Siswa\ PAUD / Penduduk\ usia\ PAUD) \times 100\%$ $APK\ SD = (Siswa\ SD / Penduduk\ usia\ SD) \times 100\%$ $APK\ SMP = (Siswa\ SMP / Penduduk\ usia\ SMP) \times 100\%$	92,77	Persen
	Indikator ini dipilih untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	$APM\ PAUD = (Siswa\ usia\ PAUD / Penduduk\ usia\ PAUD) \times 100\%$ $APM\ SD = (Siswa\ usia\ SD / Penduduk\ usia\ SD) \times 100\%$ $APM\ SMP = (Siswa\ usia\ SMP / Penduduk\ usia\ SMP) \times 100\%$	90,17	Persen



Sasaran	Alasan	Indikator Kinerja	Formulasi	Target 2022	Satuan
	yang sedang ditempuh				
Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kelulusan siswa.	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100 Persentase AL = $\frac{JL}{JL2} \times 100$ JL: Jumlah Siswa JL2: Jumlah Siswa tahun sebelumnya	100	Persen
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur IKM}}$ (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total unsur yang terisi) x Nilai Penimbangan	85,05	Poin

G. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan Walikota Bandung dan



besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Satuan
Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	92,77	Persen
	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	90,17	Persen
Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	100	Persen
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,05	Poin

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan



Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan 2020-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 dan hasil reviu Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan RENSTRA 2018-2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kota Bandung
Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	92,77	94,75	102,13%
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	90,17	90,26	100,10%
2	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	100	100	100.00%
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.05	85.25	100.24%

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Angka Kelulusan dengan capaian kinerja 100 %. Capaian kinerja indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" semester 2 adalah sebesar 85.25 dari target sebesar 85.05 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.24%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan

Capaian kinerja pada indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar adalah 102,13% dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar adalah 100,24%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.



C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pendidikan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah sebagai berikut

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	92,77	94,75	102,13%
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	90,17	90,26	100,10%
2	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	100	100	100.00%
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,05	85.25	100.24%

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022

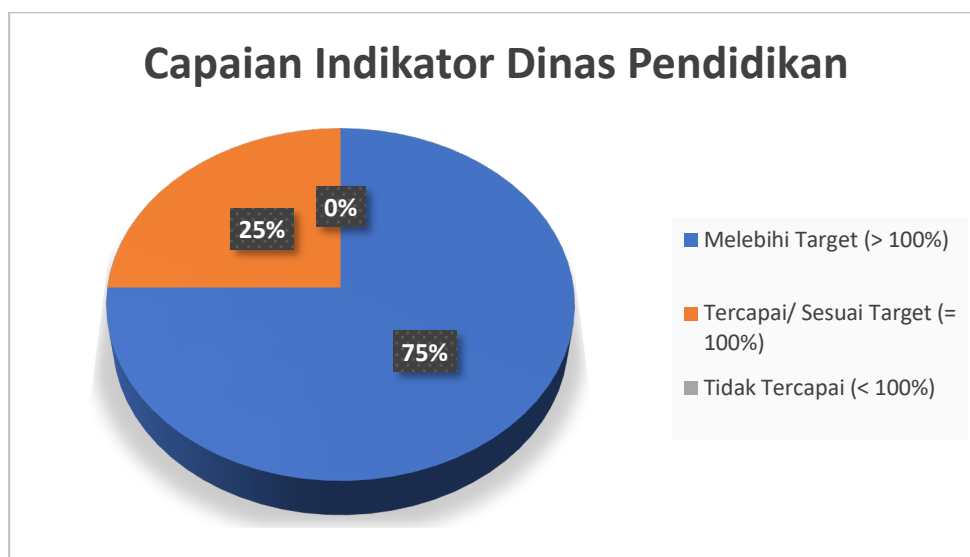
NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	75%
2	Sesuai Target	25%
3	Tidak Mencapai Target	0%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran di atas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
		Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Misi 1	4	3	75	1	25	0	0
Jumlah	4	3	75	1	25	0	0



Grafik 1. Capaian Indikator Dinas Pendidikan



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2020-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5**Analisis Pencapaian Sasaran tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		% TARGET	TAHUN 2022		%	TAHUN 2023
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	92,70	90,37	92,70	92,77	94,75	102,13%	92,86
	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	90,10	84,65	90,10	90,17	90,26	100,10%	90,23

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada



jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Formulasi perhitungan APK sebagai berikut:

$$\text{APK PAUD} = (\text{Siswa PAUD} / \text{Penduduk usia PAUD}) \times 100\%$$

$$\text{APK SD} = (\text{Siswa SD} / \text{Penduduk usia SD}) \times 100\%$$

$$\text{APK SMP} = (\text{Siswa SMP} / \text{Penduduk usia SMP}) \times 100\%$$

Capaian kinerja pada indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah 94,75% dengan persentase capaian 102,13%. Serta bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 92,86% maka capaian kerjanya 102,03%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar Kota Bogor tahun 2022 sebesar 89,64%.

Untuk mencapai dan mendukung kinerja indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan:

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD, Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD)
2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meliputi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan, Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah,
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar meliputi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Pengadaan Mebel Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan

Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah.

4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang Kelas Baru, Pengadaan Mebel Sekolah, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi
2. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD dan SMP

Faktor Penghambat:

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik
2. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak

Solusi:

1. Akan diadakan sebuah tim unit reaksi cepat untuk pendataan anak putus sekolah
2. Pendayagunaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik



Gambar.1 Pembelajaran di Sekolah Dasar



Gambar 2. Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Menengah Pertama



Gambar 3. Peresmian Gedung Baru SDN 248 Sindangsari



Gambar 4. Workshop Peningkatan Kompetensi PTK

Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar didukung melalui 1 program dan 4 kegiatan dengan anggaran yang sebesar Rp. 691.286.689.250 dan Realisasi sebesar Rp. 626.754.897.769, persentase realisasi sebesar 90,66% dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Pengelolaan Pendidikan	691.286.689.250	626.754.897.769	90,66%
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	54.446.636.492	46.494.405.871	85,39%
2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.027.548.075	19.826.835.740	99,00%
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	370.878.285.488	345.891.032.229	93,26%
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	245.934.219.195	214.542.623.929	87,24%

2. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang yang sesuai dengan standar tersebut.

Formulasi perhitungan APM sebagai berikut:

$$\text{APM PAUD} = (\text{Siswa usia PAUD} / \text{Penduduk usia PAUD}) \times 100\%$$

$$\text{APM SD} = (\text{Siswa usia SD} / \text{Penduduk usia SD}) \times 100\%$$

$$\text{APM SMP} = (\text{Siswa usia SMP} / \text{Penduduk usia SMP}) \times 100\%$$

Capaian kinerja pada kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar adalah 90,26% dengan persentase capaian 100,10%. Serta bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 90,23% maka capaian kerjanya 100,03%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar Kota Bogor tahun 2022 sebesar 88,06%.



Untuk mencapai dan mendukung tercapainya kinerja indikator Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar terdapat Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan:

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD, Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD)
2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meliputi Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan, Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah,
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar meliputi Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, Pengadaan Mebel Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah.
4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Penambahan Ruang Kelas Baru, Pengadaan Mebel Sekolah, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi
2. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD dan SMP

Faktor Penghambat:

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik
2. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak

Solusi:

1. Akan diadakan sebuah tim unit reaksi cepat untuk pendataan anak putus sekolah
2. Pendayagunaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik



Gambar 5. Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah



Gambar 6. Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah



Gambar 7. Pem Workshop Peningkatan Kompetensi PTK



Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar didukung melalui 1 program dan 4 kegiatan dengan anggaran yang sebesar Rp. 691.286.689.250 dan Realisasi sebesar Rp. 626.754.897.769, persentase realisasi sebesar 90.66% dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Pengelolaan Pendidikan	691.286.689.250	626.754.897.769	90,66%
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	54.446.636.492	46.494.405.871	85,39%
2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.027.548.075	19.826.835.740	99,00%
3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	370.878.285.488	345.891.032.229	93,26%
4	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	245.934.219.195	214.542.623.929	87,24%



Tingkat Efisiensi dan Efektifitas

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	%	92,77	94,75	102,13	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	691.286.689.250	627.884.237.756	90,83%
		2	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	%	90,17	90,26	100,10					
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR										
TINGKAT EFISIENSI 10.45 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 111.53 %												

Pada sasaran meningkatnya aksesibilitas pendidikan tingkat efisiensinya sebesar 10.45% dan tingkat efektifitasnya 111.53 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 691.286.689.250 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 627.884.237.756. Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada sasaran meningkatnya aksesibilitas pendidikan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan TK, SD, maupun SMP dengan total Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Bandung sebanyak 23.721 Orang.



Sasaran 2
Terwujudnya Mutu Pembelajaran

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran tahun 2022
Terwujudnya Mutu Pembelajaran

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
Angka Kelulusan	persen	100	100	100	100	100	100	100

Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan pada tahun 2022 terealisasi 100,00% dari target sebesar 100,00% atau capaian kinerja sebesar 100,00% dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2023 sebesar 100,00% maka capaian kerjanya sebesar 100.00%. Serta bila dibandingkan dengan standar nasional capaiannya sudah sesuai yaitu 100%. Persentase kelulusan yang 100,00% mengindikasikan adanya peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung.

Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan. Formulasinya: Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa peserta Ujian pada tingkat pendidikan tertentu x 100.

Angka kelulusan merupakan indikator kinerja daerah yang menggambarkan keberhasilan siswa Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan. Formulasinya: Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa peserta Ujian pada tingkat pendidikan tertentu x 100.



Angka kelulusan mencerminkan keberhasilan sekolah dalam tata kelola dan proses belajar mengajar yang membekali siswa untuk dapat lulus di ujian sekolah. Sehingga hal tersebut dipandang perlu mendapatkan perhatian untuk menjamin bahwa siswa-siswi di akhir jenjang sekolah memiliki standar kompetensi yang telah dirumuskan melalui ujian sekolah.

Untuk mendukung tercapainya kinerja Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan terdapat program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kurikulum

Kegiatan:

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar meliputi Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar)
- b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal meliputi Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan: Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meliputi Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

3. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi Penyelenggaraan Proses Belajar.
2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meliputi Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan, Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar meliputi Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik,

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar.

4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung Capaian Angka Kelulusan terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut

1. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten
2. Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan yang memenuhi standar
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang baik.



Gambar 8.Prestasi Siswa



Gambar 9. Prestasi Siswa



Gambar 10, Prestasi Siswa

Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Angka Kelulusan didukung melalui 3 program dan 2 kegiatan dengan



anggaran sebesar Rp. 12.226.286.000 dan realisasi sebesar Rp. 9.120.575.500 dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Kurikulum	726.705.000	698.860.000	96,17%
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	477.600.000	458.070.000	95,91%
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	249.105.000	240.790.000	96,66%
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.499.581.000	8.421.715.500	73,23%
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.499.581.000	8.421.715.500	73,23%
3	Program Pengelolaan Pendidikan	2.997.610.950	2.782.202.505	92,81%



Tingkat Efisiensi dan Efektifitas

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	1 Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	%	100	100	100,000	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	726.705.000	698.860.000	96,17%
							2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11.499.581.000	8.421.715.500	73,23%
							3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.997.610.950	2.782.202.505	92,81%
							RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100,00	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT EFISIENSI 21.82 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 127.90 %											

Pada sasaran terwujudnya mutu pembelajaran tingkat efisiensinya sebesar 21.82% dan tingkat efektifitasnya 127,90 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.223.896.950 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.902.778.005. Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada sasaran terwujudnya mutu pembelajaran didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan TK, SD, maupun SMP dengan total Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Bandung sebanyak 23.721 Orang.

Sasaran 3

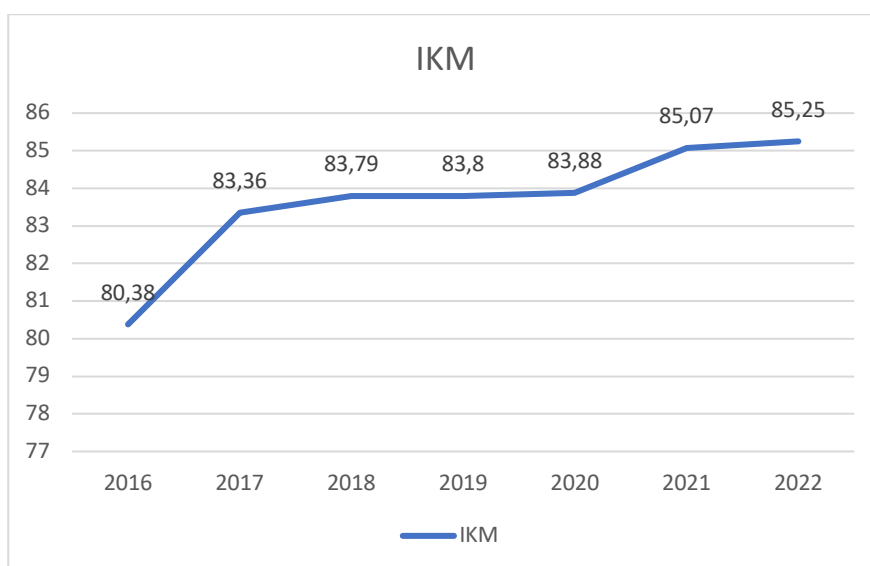
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	85.00	85.07	100.08	85.05	85.25	100.24	85,10

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 85.25 dari target sebesar 85.05 dengan persentase capaian kinerjanya adalah 100.24%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 85.10 maka capaian kerjanya 100,10%.

Kualitas pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 11. Perkembangan Nilai IKM

Untuk mendukung tercapainya kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah dengan adanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota salah satunya kegiatan

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Tersedianya anggaran, peralatan dan sumber daya manusia
2. Adanya sistem dan pendampingan terhadap pelayanan kepada sekolah dan masyarakat, baik dalam hal administrasi dan konsultasi
3. Ketersediaan layanan informasi dalam bentuk online.

Faktor Penghambat :

Belum tersosialisasikan secara menyeluruh mengenai layanan di Dinas Pendidikan

Solusi:

Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada satuan Pendidikan dan *stakeholder* lainnya dan masyarakat.



Gambar 12. Gedung Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Bandung



Intervensi Dinas Pendidikan dalam mendukung Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat didukung melalui 1 program dengan anggaran sebesar Rp. 12.226.286.000 dan realisasi sebesar Rp. 9.120.575.500 dengan rincian sebagai berikut:

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.759.005.275	20.532.371.122	94,36%
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	461.551.000	398.140.000	86,26%
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	169.264.000	168.802.240	99,73%
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.170.757.065	13.715.213.496	96,79%
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.948.410.400	3.754.448.476	95,09%
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.718.107.010	2.206.926.910	81,19%
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290.915.800	288.840.000	99,29%



Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				
				Target	Realisasi	(%)	No	Program	Pagu	Realisasi	%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	85,05	85,25	100,24	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.180.760.938.301	944.349.359.582	79,98%
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR							TOTAL PER SASARAN	1.180.760.938.301	944.349.359.582	79,98%	
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 20.26 %											
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 125.33 %											

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah tingkat efisiensinya sebesar 20.26% dan tingkat efektifitasnya 125.33 % dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.180.760.938.301 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 944.349.359.582. Keberhasilan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pada sasaran terwujudnya mutu pembelajaran didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang terdapat di Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan TK, SD, maupun SMP dengan total Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Bandung sebanyak 23.721 Orang.

D. Realisasi Anggaran

Untuk analisis efektifitas dan analisis efisiensi anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung saling terkait antara sasaran yang satu dengan lainnya. Namun demikian pada paragraf berikut ini merupakan penjelasan singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2022 dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.9
Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Pendidikan			
Dinas Pendidikan	1.954.570.734.501	1.651.307.573.399	84,48%
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	761.583.510.200	697.850.225.261	91,63%
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55.126.640.092	47.245.776.836	85,70%
1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.808.225.100	2.259.346.938	80,45%
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	664.338.912	508.717.226	76,57%
1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	487.412.200	382.665.840	78,51%
1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	297.255.280	292.063.200	98,25%
1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	318.175.000	223.927.725	70,38%
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000	173.192.000	86,60%
1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	680.003.600	584.836.965	86,00%



Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	23.363.000.000	18.073.000.000	77,36%
1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	628.308.000	569.692.360	90,67%
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.325.850.000	23.919.882.000	94,45%
1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	354.072.000	258.452.582	72,99%
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.344.185.425	20.114.623.090	98,87%
1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	236.127.350	207.477.350	87,87%
1.01.02.2.04.06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	718.831.000	640.083.795	89,05%
1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	80.510.000	80.310.000	99,75%
1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	573.696.200	470.354.157	81,99%
1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	18.370.499.875	18.369.009.875	99,99%
1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	364.521.000	347.387.913	95,30%
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	389.876.445.488	365.159.487.486	93,66%
1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.070.000.000	1.021.301.000	95,45%
1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	38.407.199.520	33.776.871.674	87,94%
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	14.030.374.366	12.952.091.547	92,31%
1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	7.573.028.400	6.815.340.000	89,99%
1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-	-
1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	17.444.160.000	17.444.160.000	100,00%
1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	484.000.000	456.206.250	94,26%



Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	691.694.396	686.889.616	99,31%
1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	749.000.000	591.230.000	78,94%
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	199.069.350.806	192.745.026.899	96,82%
1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	273.100.000	270.669.000	99,11%
1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	35.453.798.000	34.673.201.500	97,80%
1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	74.630.740.000	63.726.500.000	85,39%
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	296.236.239.195	265.330.337.849	89,57%
1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	244.560.000	241.309.775	98,67%
1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	12.439.689.020	11.318.330.000	90,99%
1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	50.209.011.542	45.057.536.531	89,74%
1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	15.683.256.342	13.634.981.262	86,94%
1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	-	-	-
1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	49.855.050.000	49.739.625.000	99,77%
1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	446.970.000	432.070.940	96,67%
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	890.936.000	887.372.492	99,60%
1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	118.795.422.212	110.586.071.111	93,09%
1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	250.000.000	243.413.158	97,37%
1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.692.194.079	2.548.127.580	94,65%



Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	44.729.150.000	30.641.500.000	68,50%
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	726.705.000	698.860.000	96,17%
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	477.600.000	458.070.000	95,91%
1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	210.000.000	191.190.000	91,04%
1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	267.600.000	266.880.000	99,73%
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	249.105.000	240.790.000	96,66%
1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	144.292.000	139.260.000	96,51%
1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	104.813.000	101.530.000	96,87%
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11.499.581.000	8.421.715.500	73,23%
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.499.581.000	8.421.715.500	73,23%
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.499.581.000	8.421.715.500	73,23%
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.180.760.938.301	944.336.772.638	79,98%
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	461.551.000	398.140.000	86,26%
1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	169.425.000	165.840.000	97,88%
1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	44.550.000	39.600.000	88,89%
1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.576.000	192.700.000	77,83%



Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.159.001.933.026	923.804.401.516	79,71%
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.158.910.847.426	923.714.597.516	79,71%
1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	91.085.600	89.804.000	98,59%
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	169.264.000	168.802.240	99,73%
1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	169.264.000	168.802.240	99,73%
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.170.757.065	13.715.213.496	96,79%
1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	416.822.930	361.515.763	86,73%
1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.618.050	47.052.900	91,16%
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	766.238.750	753.442.758	98,33%
1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.613.495.200	11.426.295.000	98,39%
1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	469.054.137	328.796.525	70,10%
1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	237.224.000	212.526.100	89,59%
1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	354.391.000	345.542.000	97,50%
1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	261.912.998	240.042.450	91,65%
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.948.410.400	3.754.448.476	95,09%
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.589.267.400	3.491.871.200	97,29%
1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	359.143.000	262.577.276	73,11%
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.718.107.010	2.206.926.910	81,19%
1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	254.023.000	217.770.800	85,73%

Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.353.534.320	1.055.255.737	77,96%
1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.110.549.690	933.900.373	84,09%
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290.915.800	288.840.000	99,29%
1.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	290.915.800	288.840.000	99,29%

Dari pagu anggaran **Rp. 1.954.570.734.501** yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar **Rp. 1.651.307.573.399** sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung sampai akhir Desember 2023 adalah sebesar **84,48%**. Ini menginformasikan bahwa daya serap menunjukkan kinerja **Baik**.

Berikut tabel rekapitulasi tingkat pencapaian kinerja keuangan pada 14 (empat belas) kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung selama tahun 2022:

Tabel 3.10
Rekapitulasi tingkat pencapaian Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2022

Urutan	Rentang Capaian Daya serap Anggaran	Kategori Capaian	Jumlah Kegiatan	Persentase
I	>90	Sangat Baik	8	57,14%
II	>75.00 – 89.99	Baik	5	35,71%
III	65.00 – 74.99	Cukup	1	7,14%
IV	50.00 – 64.99	Kurang	0	0,00%
V	0 – 49.99	Sangat Kurang	0	0,00%



Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, dari sebanyak 14 Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Bandung pada tahun 2022, terdapat 8 (57,14%) kegiatan dengan capaian kinerja keuangannya sangat baik, terdapat 5 (35,71%) kegiatan dengan capaian kinerja keuangannya baik, terdapat sebanyak 1 (7,14%) kegiatan dengan capaian kinerja keuangannya cukup, terdapat sebanyak 0 (0,00%) kegiatan dengan capaian kinerja keuangannya kurang, dan terdapat sebanyak 0 (0,00%) kegiatan dengan capaian kinerja keuangannya sangat kurang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Bandung 2018-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 3 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- 3 Sasaran terdiri dari 4 indikator dengan 3 indikator melebihi target dan 1 indikator sesuai target.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 1.954.570.734.501** telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 1.651.307.573.399** sehingga persentase daya serap anggaran Dinas Pendidikan Kota Bandung sampai akhir Desember 2022 adalah sebesar **84.48%**.

B. Saran

Adapun dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang, terdapat beberapa saran yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Memperdayakan penilik untuk melakukan pendataan warga kota Bandung yang belum sekolah
2. Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan pengumpulan data dengan beberapa instansi/lembaga sehingga data bisa terdata, terkumpul dan tersimpan dengan baik.

C. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi pada tahun 2022 Dinas Pendidikan harus segera meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kota Bandung. Atas Rekomendasi tersebut Dinas Pendidikan telah melaksanakan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui 35 kegiatan Bimtek/Pelatihan kepada 13.997 Pendidik dan Tenaga Kependidikan, telah melaksanakan panduan dan bimbingan implementasi kurikulum merdeka. Serta dalam rangka pemenuhan



infrastruktur Pendidikan, Dinas Pendidikan telah merealisasikan rehabilitasi 65 ruang kelas SD, rehabilitasi 78 ruang kelas SMP, pembangunan 26 ruang kelas SD, pembangunan 72 ruang kelas SMP, pelengkapan fasilitas belajar pada 2 TK, pengadaan 1.510 laptop dan penyediaan 10.043 PTK Non ASN.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stake-holders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandung



Drs. HIKMAT GINANJAR, M.Si.
NIP. 19640629 198503 1 006



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **H. YANA MULYANA, S.E., M.M.**

Jabatan : Plt. Wali Kota Bandung

Selaku atasan langsung pihak pertama.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

H. YANA MULYANA, S.E., M.M.

Bandung, 5 Januari 2022
PIHAK PERTAMA,

Drs. **H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.**
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196406291985031006



PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	Persen	92.77
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	Persen	90.17
2	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Persen	100
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85.05

PERJANJIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TRIWULANAN			
				1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)
1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan Pendidikan Dasar	Persen				92.77
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar	Persen				90.17
2	Terwujudnya Mutu Pembelajaran	Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Kesetaraan	Persen			100	
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin		85.05		85.05



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	Program Pengelolaan Pendidikan	738.517.179.141	APBD
2	Program Pengembangan Kurikulum	666.705.000	APBD
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	11.499.581.000	APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.216.514.371.915	APBD
	Total	1.967.197.837.056	APBD



H. YANA Mulyana, S.E., M.M.

Bandung, 5 Januari 2022
PIHAK PERTAMA,



Drs. H. HUKMAT GINANJAR, M.Si.

Pendua Utama Muda
NIP. 196406291985031006

